

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Studi ini akan menganalisa tentang Efektivitas Pasardesa.id Dalam Penanganan Dampak Covid-19 Di Desa Panggungharjo. Pandemi Covid-19 cukup meredupkan segala sektor, mulai dari kesehatan, sosial, hingga perekonomian masyarakat. Redupnya sektor ekonomi usaha industri, perdagangan, dan perkantoran mengakibatkan beberapa masyarakat kehilangan pekerjaannya akibat terkena pemutusan hubungan kerja atau di rumahkan untuk sementara waktu. Adanya pelaksanaan pemutusan hubungan kerja dan dirumahkannya pegawai dan buruh menimbulkan momok yang menakutkan dan trauma tersendiri bagi mereka, mengingat kondisi ekonomi pada masa ini masih terbilang krisis bagi beberapa pihak (Sunija, Febriani, Raharjo , & Humaedi, 2019). Hal tersebut berlaku pula pada Desa Panggungharjo Kabupaten Bantul, hampir sekitar 800 toko, warung, dan lapak usaha lain milik masyarakat desa setempat yang mengalami kemunduran pendapatan di Desa Panggungharjo (Kafa, 2020).

Kemunduran perekonomian masyarakat di Desa Panggungharjo di karenakan banyak dari mereka yang terkena PHK dari tempat kerja dan kemunduran usaha yang mereka dirikan. Permasalahan tersebut secara otomatis menimbulkan ketimpangan perekonomian masyarakat Desa Panggungharjo di masa Pandemi Covid-19 ini. Guna memulihkan perekonomian desa yang meredup, Pemerintah Desa Panggungharjo membentuk suatu *platform* jual beli yang bertujuan untuk menstabilkan

kebutuhan dengan memanfaatkan ketersediaan produk yang dimiliki masyarakat desa yang berbasis kemandirian dan pemanfaatan produk lokal sesuai dengan Peraturan Desa Panggunharjo Nomor 9 Tahun 2015. Adapun *platform* tersebut ialah Pasardesa.id.

Pasardesa.id dibentuk pada bulan April 2020 dan diresmikan oleh Kementerian PDPT pada tanggal 13 April 2020 (Kafa, 2020). Terdapat empat latar belakang pelaksanaan Pasardesa.id (Kafa, 2020):

1. Mitigasi sebagai stabilisasi kondisi pasar untuk tetap menjalankan kegiatan jual beli dengan daring agar meminimalisir penyebaran wabah.
2. Solidaritas untuk membantu sesama penjual dan pembeli, yang mana penjual tetap mendapatkan pemasukan dan pembeli tetap dapat mendapatkan barang kebutuhannya meski di masa Pandemi Covid-19 tanpa berbelanja keluar rumah.
3. Kolaborasi antara pemerintah sebagai stakeholder yang menyediakan barang untuk di jual terhadap penjual agar dapat di jual kembali guna memutar keuangan masyarakat.
4. Pemenuhan perekonomian bagi masyarakat agar terus berputar pada daerahnya sebab ia menjual dan membeli dari daerahnya sendiri.

Tujuan dari pembentukan Pasardesa.id ini ialah membantu perekonomian masyarakat dengan mempermudah kegiatan jual beli yang terlaksana melalui aplikasi android. Pengadaan Pasardesa.id dapat dijadikan sebagai tempat tumbuh kembang BUMDES dan masyarakat Desa Panggunharjo untuk meningkatkan pendapatan dan memnuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat

Desa Panggungharjo. Pada pemulihan ekonomi dimasa Pandemi Covid-19 ini, Pasedesa.id telah meraih Top 21 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian PANRB dan ditetapkan sebagai salah satu pusat keunggulan desa (Aina, 2021). Pemanfaatan digital di sektor perekonomian ini mampu membangunkan peduli teknologi bagi masyarakat agar di manfaatkan lebih baik dan berguna di kala pandemi ini serta menjaga rantai kebutuhan dan dukungan bantuan langsung yang menekankan pada aspek pendapatan, pekerjaan, pola konsumsi, dana cadang, aset desa, dan jaminan sosial di Desa Panggungharjo dengan melakukan kebiasaan baru melalui kolaborasi teknologi dan perekonomian bagi masyarakat dan Pemerintah Desa di era kedepannya guna menghadapi kebangkitan di masa Pamdemi COVID-19 (Agustin, 2020).

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang dirancang oleh Pemerintah Desa Panggungharjo melalui Pasedesa.id guna melihat efektivitas *platform* sebagai wadah bantuan pemulihan ekonomi, maka diketahui bahwasannya melalui platform tersebut terdapat kenaikan penjualan dan pendapatan masyarakat Desa Panggungharjo yang ditemukan pada bulan Mei Desa Panggungharjo berhasil melaksanakan jual beli 668 produk dari 54 UMKM desa serta melaksanakan distribusi beras sebesar 490 kg dalam desa 98 paket bantuan sembako. Dari kegiatan tersebut, mitra usaha di Desa Panggungharjo berhasil mendapatkan omset 100,69 juta dari 2.480 transaksi selama 25 hari (Pemerintah Kabupaten Bantul Kecamatan Sewon, 2020). Dibulan Oktober 2020, *Platform* Pasedesa.id telah mencapai pendapatan sekitar Rp.1,6 Miliar,

berupa 6.000 transaksi dengan menjual 4.000 produk dari 152 UMKM di 5 Kecamatan Desa Panggungharjo (KAGAMA, 2020).

Apabila dikaitkan dengan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Mahmudi (2005) yang menjelaskan bahwa efektivitas dapat berlangsung jika kontribusi *output* dengan sasaran semakin besar, maka semakin efektif pula kebijakan atau program yang dibentuk, maka dapat terlihat bahwa terdapat kenaikan penjualan produk, transaksi jual beli bahkan pendapatan yang cukup tinggi. Dari sini dapat diketahui bahwa pelaksanaan Pasardesa.id dalam penanganan dampak Covid-19 terbilang efektif sebab telah mendapatkan hasil yang optimal dari partisipasi masyarakat yang melaksanakan kegiatan jual beli dengan Pasardesa.id. Penerapan *platform* pada Desa Panggungharjo juga mewujudkan pelaksanaan *E-Government* yang berfungsi untuk mempermudah segala aktivitas pelayanan publik dari pemerintah terhadap masyarakat (Nur, 2014). Namun pemanfaatan Pasardesa.id sebagai salah satu bentuk *E- Government* dan penanganan dampak Covid-19 juga perlu memperhatikan tentang bagaimana pembentuk program mampu mempertahankan keberhasilannya melalui pelaksanaan teknis dilapangan secara riil dengan penemuan data yang telah dipaparkan oleh Pemerintah desa. Oleh karena itu dengan adanya data terkait pelaksanaan Pasardesa.id di Desa Panggungharjo, peneliti hendak menguji keabsahan efektivitas *platform* secara langsung ke lokasi yang kemudian peneliti analisa dan peneliti paaparkan melalui penelitian yang berjudul **“EFEKTIVITAS PASARDESA.ID DALAM PENAGANAN DAMPAK COVID-19 DI DESA PANGGUNG HARJO.**

Alasan peneliti menetapkan Desa Panggungharjo sebagai lokasi penelitian ialah adanya keinginan untuk menguji realisasi dari keberhasilan berupa efektivitas *platform* dalam penanganan dampak COVID-19 berdasarkan data dan fakta yang peneliti temukan dilapangan yang nantinya akan dikaitkan dengan latar belakang pengadaan Pasardesa.id akan disesuaikan dengan teori Kafa (2020) yang menjelaskan tentang mitigasi, solidaritas, kolaborasi dan pemenuhan ekonomi melalui *platform* tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah “*Bagaimanakah efektivitas program platform pasardesa.id oleh Pemerintah Desa Panggungharjo di masa Pandemi covid-19?*”

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari rumusan masalah yang ada di atas adalah untuk mengetahui efektivitas program *platform* pasardesa.id oleh Pemerintah Desa Panggungharjo di masa Pandemi Covid-19.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

### **1) Manfaat secara teoritis**

Manfaat teoritis yang di dapatkan dari penelitian ini ialah mengetahui mengembangkan pengetahuan dan keilmuan yang di dapatkan dari materi perkuliahan khususnya mengenai evaluasi kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu, manfaat dari adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai pandangan kedepan bagi pembaca tentang efektivitas yang telah di laksanakan Pemerintah Desa dalam pemanfaatan digital dalam penanggulang Pandemi Covid-19 di sektor perekonomian.

## 2) Manfaat secara praktis

Manfaat praktis yang di dapatkan dari penelitian ini ialah adanya pandangan bagi pemerintah desa lain untuk melakukan kegiatan yang serupa dalam penekananan angka Covid-19 serta pemulihan perekonomian masyarakat di wilayahnya juga memberikan bukti yang konkret mengenai keberhasilan dan kegagalan pemerintah Desa Panggungharjo dalam mengadakan program pemulihan ekonomi serta pengantisipasi penyebaran wabah penyakit di masa Pandemi Covid-19 Desa Panggungharjo.

## B. Tinjauan Pustaka

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul Jurnal	Jurnal	Tahun	Kesimpulan
----	---------	--------------	--------	-------	------------

1.	Ansarullah, Abdul Kadir, La Ode Mustafa	Efektifitas Organisasi Pemerintahan Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara	Publica : Jurnal Adminstrasi & Kebijakan Publik, Vol.10, No.1	2019	Efektifitas dari kinerja organisasi pemerintah terwujud dari input yang di hasilkan secara konsisten melalui norma dan kebijakan yang berlaku sehingga mampu mensukseskan program yang di tuju sesuai visi misi dalam pencapaian target agar kegiatan organisasi ternilai secara ideal.
2.	Amir Syarifudin Kiwang, David B.W Pandie, & Frans Gana.	Analisi Kebijakan dan Efektivitas Organisasi.	JKAP: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Vol. 19, No.1.	2015	Penilaian suatu Organisasi terhadap efektivitas kinerja dapat di lihat dari enam elemen penting, yakni adanya tujuan yang strategis, pemanfaatan sumber daya, pengelolaan lingkungan, komunikasi, kepemimpinan, penentuan inovasi serta upaya dalam organisasi. Menurut penulis, apabila efektivitas kinerja berpedoman pada elemen-elemen tersebut maka tidak menutup kemungkinan jika pelaksanaan program atau kegiatan yang di laksanakan dapat berjalan sesuai dengan sasaran saat perencanaan di mulai. Selain itu, dibuthkannya spesialisasi dalam keberlangsungan program sangatlah di butuhkan agar dapat meminimalisir keterbatasan yang ada.

		Efektivitas Inovasi Kebijakan Publik: Pengaruhnya Pada Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia.	Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA)	2018	Penilaian pada inovasi atau program dapat dilihat dari efektivitas kinerja organisasi yang terkait. Sebelum menelaah seberapa efektifnya inovasi atau program, di butuhkan pula penilaian terhadap inovasi yang berlangsung. Kualitas inovasi yang kerap dianggap buruk pun juga mampu mengurangi efektivitas dari pelaksanaan kegiatan nantinya. Oleh karena itu perlu adanya kajian komperhensif mengenai perkembangan dari inovasi atau program yang berlangsung agar input yang di hasilkan dapat dinilai secara rinci sehinnnga akan semakin jelas pula sejauhmana efektifitas dari inovasi yang di selenggarakan sebagai kebijakan publik.
4.	Muh. Kadarisman	Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Administrasi di	Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 16 No.1.	2019	Efektifitas dari kinerja pemerintah merupakan salah satu faktor keberhasilan atas pelaksanaan pelayanan publik. Kerjasama antar



		Kota Depok			pegawai guna menempuh efektifitas dapat terlaksana di bidang kinerja pegawai, pemanfaatan waktu, dan penentuan target sesuai dengan pengelolaan program yang berlaku.
5.		Soda Molek: Efektifitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Naikoten II Kecamatan Kota Raja Kota Kupang.	Jurnal Inovasi Kebijakan, Vol. 4 No.2	2019	Menurut peneliti dalam jurnal ini, efektifitas dari kebijakan publik dapat di pengaruhi dari ketersediaan sumber daya manusia, pendisiplinan pegawai saat melaksanakan pekerjaan, komitmen pelayanan publik, ketersediaan sarana serta prasarana, dan anggaran yang berlaku. Efektifitas pada pelayanan publik pun mampu mendukung adanya tata kelola pemerintahan yang baik melalui berbagai inovasi yang ada.
6.	Afni Regita Cahya Muis	Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19.	SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i, Vol. 7 No.7.	2020	Dalam penciptaan transparansi pelayanan, pemerintah merupakan suatu kunci atas keberhasilan yang efektif melalui putusan yang di berikan terhadap negara dan masyarakatnya dalam menghadapi kondisi genting seperti halnya pandemi Covid-19 ini. Putusan dari pelaksanaan

					kebijakan tersebut juga dapat di masukkan dalam golongan strataegi nasional sehingga masyarakat dapat melihat anjang-ancang secara konkret yang dimiliki pemerintah untuk menghadapi berbagai permasalahan, terutama sosial, ekonomi, dan kesehatan ini. Salah satu latar belakang mengapa pemerintah diminta untuk transparansi, yakni keinginannya pemerintah untuk memoertahankan good governance yang telah mereka bentuk serta melihat seberapa jauh konklusi mereka saat menghadapi masalah negara.
7.	Sri Hartati & Putri Pertiwi.	Pemanfaatan Electronic Government dalam Pemberdayaan Pemerintah & Potensi Desa Berbasis Web Pada Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan.	Jurnal TAM: Technology Accepted Model. Vol. 3.	2014	Penggunaan teknologi untuk pelaksanaan sistem pemerintah sangatlah membantu pemerintah dalam menuju program E-Government untuk mengimplementasikan potensi pegawai serta masyarakat dalam melaksanakan pelayanan agar berkualitas serta transparan sebab dapat di jangkau segalalapisan masyarakat.
8.	Lilik Handajani, Furkam Akram, &	Industri Kopi Lombok di Desa Sigerongan Kabupaten	Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram,	2019	Manajemen dalam pengembangan usaha mampu menekan dampak yang di latar belakang

	Muhammad Rifai Lalu	Lombok Barat	Vol. 6, No.3.		oleh biaya operasional yang tinggi, perputaran modal yang sulit, serta lambatnya potensi produksi yang mampu menyebabkan pendapat di pasar berkurang. Pengelolaan usaha tersebut dapat di minimalisir dengan pemanfaatan teknologi digital berbasis platform untuk membantu penjual untuk memasarkan daganagannya kepada masyarakat. Hal ini juga dapat di laksanakan bagi <i>home industry</i> karena tidak mengharuskan mereka untuk mendirikan atau menyewa toko secara fisik.
9.	Achmad Zaki Yamani, Arif Muhammad Wirawan, Muhammad Nur Faiz.	Penguatan Ekonomi Lokal Pada Pelaku UMKM Berbasis Digital di Desa Winduaji Kabuapten Brebes.	Jurnal Madani, Vol.1, No.1	2019	Pelaku UMKM membutuhkan teknologi digital dalam mengembangkan bisnisnya. Akan tetapi, pemanfaatan digital dapat berlangsung secara Efektif apabila terdapat pengetahuan mengenai penggunaan teknologi berbasis digital yang dapat di tunjang melalui pelatihan atau diklat yang di laksanakan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat agar diketahui seberapa Banyak peminat pelaksana UMKM berbasis digital.
10.	Amanda Mastisia Rakanita	Pemanfaatan E-Commerce dalam	Jurnal EKBIS, Vol.20, No.2	2019	Pemanfaatan E- Commerce mampu meningkatkan pendapatan UMKM

		Meningkatkan Daya Sain Di Desa Karangsari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.			Sebab mampu memasarkan produk secara mudah tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang tinggi serta mampu meningkatkan kegiatan transaksi antara penjual dengan pembeli.
11.	Ayu MaulindaWied iawati, Anggi Aprillia Pratiwi, &GalangBima ndara	Pelatihan Digital Marketing Strategi untuk Mencapai Kemandirian Masyarakat.	Jurnal Dinamisia, Vol. 3, No.1.	2019	Potensi di suatu desa tidak mampu berkembang apabila masyarakat desa setempat tidak memiliki kreatifitas dan inovasi dalam mengelola potensi tersebut. Pada penelitian ini, masyarakat desa setempat mengelola sumber daya desa yang mereka miliki, kemudian masyarakat memasarkan produk melalui platform penjualan digital untuk menarik pelanggan. Hal ini terbukti berhasil karena mereka mampu mendapatkan penghasilan dari pengelolaan potensi secara kreatif dari pemanfaatan digital secara fungsional.
12.	Bambang SetiyoPambudi & Suyono.	Digital Marketing An Integrated Marketing Communication Strategy in Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) in East Java.	Competence : Journal of Management Studies , Vol.13, No.2	2019	Pemasaran produk BUMDes kini telah merambah kepada penjualan secara online yang telah meraih keuntungan dari pemasaran dengan strategi komunikasi yang di sampaikan pada media

					atau akun online untuk memikat pembeli. Hal ini menguntungkan penjual karena mereka tidak harus mengeluarkan biaya promosi besar- besaran sebab dapat di lakukan oleh setiap anggota kapanpun dan dimanapun.
13.	Bejamin Argawan, Budiyanto Halim, & Jessica Wijaya.	Pemanfaatan Digital Marketing Channel dalam Upaya Memperluas Pemasaran Produk Jahe Merah Ins tan Sarongge.	JPMI : Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia, Vol.1, No.1	2019	Pemanfaatan pemasaran secara digital memiliki tujuan untuk mengatasi segala kelemahan pada penjualan seperti halnya lambatnya pengiriman produk, minimnya jaringan penjualan, serta biaya distribusi yan tinggi. Dengan adanya digital marketing, penjual mampu memanfaatkan digital marketing seperti Toko pedia, Shopee, Instagram, dll sebagai solusi sepinya penjualan serta penekanan biaya distribusi dan pemasaran apabila dilaksan akan secara konvensional.
14.	Sarip, Aip Syarifudin, & Abdul Muaz.	Dampak COVID – 19 terhadap Perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Desa.	Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Vol.5, No.1.	2020	Penyebaran virus COVID-19 pada perekonomian desa dapat mengganggu pembangunan desa sebab mengakibatkan krisis kepercayaan antara masyarakat desa dengan pemerintah sehingga terdapat terikatnya pembangunan desa di sektor ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan

					ekonomi alangkah baiknya mampu membangun kreatifitas dan bebas dari terikatnya sistem perekonomian di tengah pandemi ini.
15.	Alek Wissalam Bustami.	Pengaruh COVID-19 terhadap Perkonomian Masyarakat di Desa Pondok Kecamatan Bukit Kerman	Jurnal Al- Dzahab, Vol.1, No.1	2020	Merosotnya perkeonomian pada seluruh wilayah di Indonesia dapat latar belakang oleh adanya kemampuan untuk menghemat biaya dbagi masyarakat untuk mengeluarkan keuangan yang seperlunya. Hal ini dapat di laksanakan apabila masyarakat tidak memiliki usaha bantuan lainnya. Oleh sebab itu, langkah menghemat dapat di jadikan salah satu langkah masyarakat Untuk memanfaatkan kepemilikannya terhadap kebutuhan yang mendesak.
16.	Agustina Mogi, Krida Puji Rahayu, & Sulistiyani Nurmono.	Bantuan Sosial Bagi Warga Terdampak Covid-19 di Kampung Parigi RT 005.	Jurnal Humanis, Vol. 2, No.1	2020	Bantuan sembako atau dana bagi masyarakat di masa Pandemi COVID-19 ini dapat bermanfaat guna memenuhi kebutuhan yang minim dimiliki oleh masyarakat hal ini disebabkan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan serta pendapatan yang memungkinkan mereka untuk memasok kebutuhan untuk beberapa saat kedepan. Maka dari itu, pemerintah sebagai penyedia bantuan dan

					<p>pelayan kebutuhan publik memiliki andil besar dalam hal ini terutama bagi masyarakat kecil yang sudah mempercayai pemerintah untuk menunjang kebutuhan masyarakat meski sedikit demi sedikit.</p>
17.	Carly E.F Maun.	Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak COVID-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.			<p>BLT yang di berikan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat desa di tengah pandemi COVID-19 ini berasal dari anggaran desa yang sebelumnya telah di susun untuk beberapa program. Akan tetapi ettap terdapat relokasi anggaran yang di laksanakan untuk pengalihan dana pada kondisi urgensi seperti ini. Hal ini dpaat di nilai efektif mengingat banyak sekali program-program yang sebenarnya tidak terlalu penting dnegan dana yang besar. Maka dari itu di perlukan pemakaian dana dari yang tidak terlalu penting terhadap yang penting.</p>
18.	Pendekatan Bisnis BUMDes Berkemajuan di Kondisi Wabah Pandemi COVID-19.	Vebri Aulia Rahmi, Hadi Fathoni, & Muhammad Zainudin.	JRE : Jurnal Riset Entrepreneurship, Vol. 3, No.2.	2020	<p>BUMDes dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini apabila menerapkan beberapa langkah dalam mengembangkan usahanya. Adapun langkah-langkah tersebut ialah mengubah metode pemasaran, penjualan, dan pemantauan produk, merancang strategi baru dalam usaha, dan</p>

					meningkatkan kualitas pelayanan. Apabila masyarakat melaksanakan langkah tersebut maka tidak menutup kemungkinan jika BUMDes dapat diandalkan sebagai sektor perekonomian desa.
19.	Sulfarina & Sri Wahyuni.	Force Majeure dan Notoir Feiten atas Kebijakan PSBB Covid- 19.	Jurnal Hukum Sasana, Vol. 6. No.1	2020	Pelaksanaan PSBB dimasa pandemi Covid- 19 telah di atur dalam PP Nomor 21 tahun 2020, dalam kebijakan tersebut menjelaskan jika psbb merupakan salah satu upaya yang mampu mendominasi penekanan virus yang menyebar secara cepat dan massif ini. Meski dianggap efektif, peneliti dalam jurnal ini juga menjelaskan jika pelaksanaan psbb juga memberikan dampak yang negatif, yakni terganggunya aktivitas perekonomian masyarakat di Indonesia. Dari keberadaan regulasi tersebut, pemerintah diminta untuk tanggap pula terhadap adanya dampak dan memberikan upaya lain guna menekan ketimpangan perekonomian di berbagai daerah Indonesia. Peneliti memandang PSBB ini berdampak riskan karena menyebabkan permasalahan baru yang



					muncul di kehidupan masyarakat pada segala lapisan strata sosial baik menengah atas maupun bawah.
20.	Raines Wadi.	Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penanganan Covid-19.	SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i. Vol. 7. No.7	2020	Konstitusionalitas dari adanya kebijakan lockdown Covid-19 merupakan pelaksanaan otonomi daerah melalui perspektif konstitusional sesuai dengan kebijakan sebelumnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan guna menangani wabah atau penyakit yang menular. Kondisi genting seerti ini tercipta pada masa pandemi covid-19 ini. Pemerintah pusat dan daerah menjadi agen yang menangani permasalahan di lingkungan masyarakat sebab dimilikinya kewenangan dan kewajiban yang tertuang dalam peraturan undang-undang.

Dari tinjauan pustaka diatas, maka efektivitas program penanganan Covid- 19 untuk sektor perekonomian dapat dilaksanakan melalui pengembangan potensi desa seperti halnya BUMDes atau UMKM yang dapat di kelola oleh masyarakat untuk masyarakat desa setempat sehingga mereka mendapatkan penghasilan dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya melalui kegiatan jual beli di desa tersebut.

Beberapa penelitian di atas juga menjelaskan tentang penjualan produk lokal yang di laksanakan secara *online* melalui *website* atau aplikasi yang di sediakan Pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di masa Pandemi Covid- 19 sebab adanya peraturan untuk mengurangi kegiatan di luar rumah sebab hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengurangi penularan wabah Covid-19. Kegiatan penjualan secara *online* juga memiliki beberapa manfaat bagi masyarakat yang tidak memiliki modal terlalu besar, yakni seperti tidak di butuhnya modal untuk menyewa toko, membayar banyak pegawai, serta meningkatkan pemasaran terhadap kalangan lain melalui penjualan yang di pasang pada website atau aplikasi yang dapat diakses untuk umum.

Meski beberapa penelitian cukup memberikan isi yang konkret mengenai efektivitas penjualan produk UMKM melalui *online*, akan tetapi belum sepenuhnya menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut serta realisasi antara tujuan dan sasaran untuk mencapai hasil yang diinginkan. Maka dari itu, pada penelitian selanjutnya, peneliti hendak memaparkan dan menjelaskan tentang efektivitas *platform* Pasardesa.id sebagai wadah *digital* masyarakat dalam melaksanakan kegiatan jual beli di masa pandemi ini. Adapun pembaharuan dari penelitian sebelumnya yang akan ada pada penelitian ini ialah tentang pemanfaatan *digital* yang di lakukan oleh Pemerintah Desa dalam membantu masyarakat desa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di kala Pandemi Covid-19 serta mengulas faktor apa saja yang menjadi pendukung serta penghambat kemajuan UMKM bila di laksanakan secara digitalisasi.

### **C. Kerangka Dasar Teori**

Teori adalah sekumpulan konsep dan definisi yang memiliki keterkaitan antar keduanya dengan tujuan untuk memberikan pandangan secara sistematis tentang fakta atau fenomena yang terjadi dan dihubungkan dengan beberapa variabel yang memiliki keterkaitan dengan fakta atau fenomena tersebut (Masri et al dalam M Nazir, 2017), maka dalam penelitian ini akan disajikan beberapa teori yang memiliki keterkaitan dengan fokus masalah yang diteliti, adapun teori-teori yang di gunakan sebagai berikut:

#### **1) Teori Efektivitas Program**

Efektivitas merupakan pemanfaatan sarana, prasarana, dan sumber daya untuk mendapatkan keberhasilan melalui barang ataupun jasa. Pada konsep ini, efektivitas dapat dijadikan sebagai penunjuk atas keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam membentuk dan melaksanakan kebijakan yang telah di tetapkan (Siagian, 2001). Apabila kontribusi *output* dengan sasaran semakin besar, maka semakin efektif pula kebijakan atau program yang dibentuk, begitu pula jika hasil yang didapatkan tidak tepat sasaran maka pelaksanaan kebijakan dan program tersebut dapat dikatakan tidak efektif (Mahmudi, 2005) .Keberhasilan dari efektivitas program tidak hanya mempertimbangkan tujuan saja, akan tetapi bagaimana penyelenggara kebijakan mampu mempertahankan keberhasilan yang di capai.

Pencapaian efektivitas pada program mampu dilihat dari takaran kuantitas, kualitas, dan waktu yang menjadi sasaran target melalui tata kelola publik (Hidayat, 1986). Menurut Julia (2010), untuk melakukan perbandingan proses dengan tujuan maka efektivitas dapat di jadikan sebagai tolok ukur pelaksanaan kebijakan publik. Dari perbandingan tersebut akan muncul sejauh mana efektivitas suatu program beserta beberapa aspeknya.

Adapun asepek-aspek yang menggambarkan tentang efektivitas program ialah (Muasaroh, 2010):

- a) Efektivitas pada tugas dan fungsi
- b) Efektivitas pada perencanaan yang terprogram
- c) Efektivitas pada keberlangsungan kegiatan

Menurut Gibson (1997), terdapat beberapa indikator dari efektivitas program, yakni (Kharisma & Yuniningsih , 2017):

- a) Penetapan kebijakan mengenai kejelasan tujuan dari kebijakan publik atau keberlangsungan program.
- b) Pelaksanaan kegiatan di suatu program atas pengimplementasian kebijakan publik yang menyangkut ketepatan waktu dan kualitas kegiatan dalam pencapaian tujuan sesuai dengan objek sasaran.
- c) Produktivitas pada stakeholder dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai tujuan kebijakan atau program untuk mewujudkan tujuan kebijakan atau program sehingga mengatasi persoalan dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan.

- d) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pada realisasi kebijakan atau program sehingga mampu mengatasi permasalahan yang di dapatkan.
- e) Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program sesuai dengan kebijakan atau program yang dibentuk oleh stakeholder atau bahkan sebaliknya, Berupa output yang nantinya disesuaikan antara tujuan dan sasaran.
- f) Kepuasan masyarakat setelah menerima layanan atau program berupa realisasi kebijakan atau program sehingga terbentuk suatu perkembangan dilingkungan masyarakat.

Pengukuran lain pada efektivitas dapat dilihat dari tiga pendekatan, yakni (Steers, 1985) :

- a) Efektivitas terhadap tujuan dan optimasi

Pengaplikasian model ini menyangkut keberhasilan dan kegagalan yang relatif dari perbandingan hasil dengan tujuan organisasi yang terkait.

- b) Efektivitas terhadap sistem

Pendekatan terhadap sistem ini terpusat pada perhatian sosial serta hubungan antara pelaku internal juga eksternal secara bersamaan guna mempengaruhi keberhasilan melalui mekanisme kebijakan guna mencapai efektivitas.

- c) Efektivitas terhadap perilaku

Pendekatan efektivitas dapat dilihat berdasarkan perilaku pemerintah terhadap masyarakat untuk meningkatkan kerelatifan homogen serta

keberhasilan organisasi dan masyarakat dalam melaksanakan program atau kebijakan publik.

## 2) **Teori *E-Government***

*E-Government* merupakan pengaplikasian teknologi dan informasi yang dapat menghubungkan pemerintah dengan pihak lain yang menghasilkan hubungan dengan masyarakat, usaha dan bisnis, dan relasi agensi (Putra & Swastika, 2016). Kehadiran *E-Government* sangatlah penting sebab mampu membantu pemerintah agar bertindak *responsive* terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, memanfaatkan keterbukaan pada teknologi dan informasi, juga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan (Elysia, Wihadanto, & Sumartono, 2017). Banyaknya tantangan yang muncul pada pemerintahan pusat maupun daerah membuat pemerintah harus mampu untuk membuat suatu dunia baru dalam sistem pemerintahan yang menyangkut pada organisasi, manajemen, serta proses kerja agar terjadi transformasi yang menuju pada *E-Government*.

Menurut *World Bank*, *E-Government* sudah seharusnya diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui akses dan jaringan yang luas pada informasi dan teknologi. Terdapat 3 faktor utama perihal hadirnya konsep *E-Government*:

a) Globalisasi

Hadirnya isu-isu seperti demokrasi, HAM, hukum, transparansi, korupsi, *civil society*, *good corporate*, dan lain-lain secara tidak langsung telah menekan pemerintahan untuk fokus pada permasalahan internal serta memposisikan masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan pelayanan tersebut. Pemerintah juga diminta agar mengadakan reposisi pada peran yang di tanggungnya dalam suatu negara.

b) Kemajuan Teknologi dan Informasi

Pesatnya perkembangan teknologi yang di dasarkan oleh rus globalisasi yang modern menyebabkan permintaan pada pelyanan publik juga di sedikan alam bidang IT tersebut agar lebih efisien dan efektif. Dengan adanya teknologi dan informasi yang diboyong oleh pemerintah dalam menerapkan sistem pemerintahannya, menjadikan data dan informasi dapat diakses secara cepat dan dapat disebarkan ke masyarakat tanpa terkecuali dengan waktu yang singkat.

c) Meningkatkan Kualitas Hidup

Adanya tingkat harapan hidup kearah yang lebih baik, yakni kesejahteraan yang merata menjadi faktor utama mengapa E-Gov harus dikembangkan secara lebih mendalam di Indonesia. Hal ini disebabkan, dengan adanya E-Government di lingkungan masyarakat, mereka bisa mengetahui informasi berupa kesehatan, pariwisata,bisnis,



perijinan dagang dan lain-lain mereka dapat mengetahui dengan gampang dan memiliki kehidupan yang lebih disiplin dan terarah.

Menurut *The World Bank Group* (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54), *E-Government* ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik.

Budi Rianto dkk (2012:36) menyimpulkan bahwa *E-Government* merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi *E-Government* memberikan peluang meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antar instansi pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Mekanisme hubungan itu melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan kolaborasi atau penggabungan antara komputer dan sistem jaringan komunikasi.

Menurut Indrajit (2002:36) *E-Government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. *E-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif. Dimana pada

intinya *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (penduduk, pengusaha, maupun instansi lain).

### **3) Teori Pemerintah Desa**

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permen no 113 tahun 2014). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan peran tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undangundang yang berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur tentang pemerinta desa, sehingga roda pemerintah berjalan dengan optimal.

Penyelenggaran Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang didesa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem

penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur tugas dan mengurus kepentingan masyarakat. Pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya pada Bupati tebusan Camat. Kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan perangkat desa, mengadakan pengawasan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang. Apabila terjadi kekosongan perangkat desa, maka Kepala Desa atas persetujuan BPD mengangkat jabatan perangkat desa (Sugiman, 2018).

#### **4) Teori Dampak Akibat Covid-19**

##### **a) Dampak Sosial**

Dampak sosial yang diakibatkan dari adanya Covid-19 ialah tertutupnya semua aktivitas masyarakat mulai dari perkantoran, sekolah, pasar, hingga tempat pariwisata. Hal ini mengakibatkan kondisi perekonomian meredup sebab adanya kebijakan terkait

pelaksanaan *lockdown* dan PSBB untuk membatasi kegiatan sosial dan menutup tempat umum tempat umum agar tidak menimbulkan keramaian sebab mampu mengakibatkan penyebaran virus. (Misno et al, 2020).

b) Dampak Ekonomi

Aspek ekonomi berkaitan erat dengan kesenjangan masyarakat tentunya, kecukupan ekonomi bagi masyarakat baru akan tercapai jika hasil pendapatan tersebut dapat menutupi keperluan masyarakat, namun melihat dari kondisi sosial masyarakat yang mana segala perubahan aktivitas pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dari kehadiran wabah covid-19 memengaruhi sistem sosial di dalamnya (Ali, 2020).

Pada sektor perekonomian ditimbulkan beberapa dampak kerugian yang meningkat sebab adanya kebijakan untuk *lockdown* atau PSBB yang mengakibatkan penurunan pada aktivitas masyarakat (Yamali & Putri , 2020). Dibiidang ekonomi perdagangan, terdapat toko, warung, minimarket, pasar, dan tempat usaha lainnya ikut tertutup karena sistem lockdown yang diterapkan. Hal ini lah yang mengakibatkan kegiatan ekonomi menurun bagi masyarakat sebab mereka mengalami kesulitan untuk menjual sebagian barang dagangannya.

Tidak hanya berpengaruh terhadap barang dagangannya saja, akan tetapi dengan ditutupnya sektor perdagangan juga mampu

mempengaruhi kebutuhan masyarakat, sebab sebagian dari mereka tidak mampu memenuhi stok kebutuhan sehari-hari nya, sehingga beberapa dari masyarakat mengalami kekurangan pada kebutuhan primer (Ahidin, 2020).

#### **D. Definisi Konsepsional**

Definisi konsepsional adalah sebuah batasan yang ditentukan oleh peneliti terkait pengertian terhadap suatu masalah penelitian dengan tujuan untuk meminimalisir kesalahpahaman dari pembaca dalam mengartikan sebuah konsep. Sementara itu, konsep dapat diartikan seperti definisi dari objek yang perlu di amati (Mardiani et al, 2016). Adapun definisi konsepsional pada penelitian ini adalah:

1. Efektivitas Program adalah realisasi tujuan dan sasaran dengan memanfaatkan sarana, prasarana, dan sumber daya untuk mendapatkan keberhasilan melalui barang ataupun jasa untuk mencapai keselarasan suatu program.
2. *E-Government* merupakan bentuk pengaplikasian pelayanan publik yang dibentuk dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk publik guna mempermudah segala pelayanan dan administrasi masyarakat.
3. Pemerintahan Desa ialah bentuk dari pelaksanaan sistem pemerintah yang berlangsung di desa dengan dikoordinir bersama kepala desa, BPD, aparatur desa, dan masyarakat desa.

4. Dampak Covid-19 selain berdampak bagi kesehatan juga berdampak dengan sosial dan ekonomi. Adapun pada dampak sosial ialah ketergangguannya aktivitas masyarakat, sedangkan pada perekonomian adanya ketergangguan pada mekanisme kerja masyarakat yang kerap mengalami PHK atau bahkan pada perdagangan tidak mempunyai para pedagang untuk berjualan. Bagi masyarakat, dampak yang dirasakan dari adanya Covid-19 ialah kesulitannya untuk memenuhi kebutuhan primer.

#### **E. Definisi Operasional**

Pada pengukuran penelitian ini, maka peneliti menetapkan efektivitas program sebagai variabel penelitian yang memiliki 6 indikator beserta parameter lainnya. Adapun teori efektivitas program yang di gunakan peneliti sebagai tolok ukur penelitian berasal dari teori Gibson (dalam Kharisma & Yuningsih (2017), yaitu:

**Tabel 1.2**  
**Variabel dan Indikator**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>
1. Penetapan kebijakan	a. Kejelasan tujuan b. Keberlangsungan program
2. Pelaksanaan kegiatan	c. Ketepatan waktu d. Kualitas Kegiatan

Produktivitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. <i>Stakeholder</i> yang melaksanakan kebijakan atau program</li> <li>f. Kegiatan yang sesuai tujuan kebijakan atau program.</li> <li>g. Mengatasi persoalan.</li> <li>h. Mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan.</li> </ul>
3. Pengawasan dan pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Pemantauan proram</li> <li>j. Pengendalian program</li> </ul>
4. Pencapaian Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Output kebijakan atau program</li> <li>c. Keseuaian antara tujuan dan sasaran</li> </ul>
5. Kepuasan dari penerima layanan atau program.	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Respon kebijakan &amp; program</li> <li>e. Penilaian pelaksanaan kebijakan atau program</li> </ul>

## F. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Penulisan proposal penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan sifat dari fenomena serta gejala yang membahas tentang perkembangan hubungan objek penelitian dengan aspek sosial di masyarakat (Surachmad, 1982). Metode ini memiliki karakteristik yang membutuhkan konsentrasi pada penyusunan masalah di penulisan dengan menyertakan pengumpulan data yang diatur, dijelaskan, dan dianalisis secara intensif dan terperinci (Nurmandi & Purnomo, 2011). Manfaat analisis kualitatif bertujuan agar

dapat memahami, memaknai, dan mendefinisikan hubungan perbandingan antar gejala sosial yang saling berhubungan (Martono, 2011).

## **2) Lokasi Penelitian**

Kantor Lurah Desa Panggunharjo Jalan KH. Ali Maksum Panggunharjo, Sewon, Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon. Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kode Pos 55188.

## **3) Unit Analisis**

Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data dan sumber informasi dari:

- a) Lurah Desa Panggunharjo
- b) Kasi Kesejahteraan
- c) Kasi Keuangan
- d) Masyarakat Desa Panggunharjo yang melaksanakan kegiatan Parsedesa.id. yakni penjual dan pembeli yang melaksanakan kegiatan perekonomian
- e) Kepala BUMDES
- f) Penanggung Jawab Parsedesa.id

## **4) Sumber dan Jenis Data**

- a) **Data Primer**



Penulis menggunakan data primer yang di dapatkan melalui hasil wawancara di kantor Pemerintah Desa Panggungharjo yang diperoleh dari narasumber dan masyarakat agar penulis mendapatkan data akurat mengenai Pasardesa.id sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menanganani dampak dari pandemi Covid-19. Tujuan wawancara agar data yang didapatkan akurat dan dapat di pertanggungjawabkan. Selain itu penulis juga mampu mengulik perihal pola pikir dan tindakan yang akan di lakukan pemerintah kedepannya dalam menekan ketimpangan perekonomian di Desa Panggungharjo.

#### **b) Data Sekunder**

Pada penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu seperti jurnal dan prosiding seminar nasional sebagai bantuan acuan data dalam penulisan ini. Selain melalui pneelitian terdahulu, penulis juga menggunakan sumber berita online dan website resmi pemerintahan untuk mendapatkan data yang spesifik mengenai kasus-kasus yang telah terjadi di Desa Panggungharjo

### **5) Teknik Pengumpulan Data**

Mengenai penelitian yang di dapatkan melalui beberapa sumber, maka penulis akan menganalisis tema tersebut dengan logika yang relevan serta di imbangi fakta yang akurat agar mempermudah dalam melakukan analisa dan pembahasan dalam penelitian ini, sehingga melahirkan

penelitian yang tidak sama seperti penelitian sebelumnya, Oleh karena itu, peneliti mendapatkan prosedur penelitian sebagai berikut:

**a) Observasi**

Penulis melakukan kedatangan langsung ke Desa Panggungharjo untuk mendapatkan fakta dan data secara langsung dari penerima program sehingga dapat mengetahui sejauh mana efektifitas program tersebut berjalan. Dari sinilah dapat di lihat apakah seluruh masyarakat memiliki respon yang positif atau bahkan negatif dari pencapaian program yang di hasilkan.

**b) Wawancara**

Wawancara menjadi penting dalam sebuah penelitian kualitatif karena akan menggali informasi yang di transformasikan dalam bentuk kata-kata. Wawancara merupakan suatu percakapan dengan memiliki tujuan tertentu yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai penanya dan pihak yang diwawancarai (narasumber) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan (Putra, 2018). Adapun dalam tahap wawancara, narasumber yang peneliti pilih antara lain sebagi berikut :

1. Lurah Desa Panggungharjo
2. Kasi Kesejahteraan
3. Kasi Keuangan
4. Masyarakat Desa Panggungharjo yang berpartisipasi dalam Pasardesa.id yakni penjual (3) dan pembeli (3)

5. Kepala BUMDES

6. Penanggung Jawab Pasardesa.id

#### **6) Teknik Analisa Data**

Menurut Hadi (1986), teknik analisa data yang di gunakan pada penelitian kualitatif dapat di lakukan melalui wawancara, *survey*, dan kajian pustaka dari penelitian sebelumnya guna mendapatkan data-data terdahulu agar mempermudah peneliti dalam membandingkan dan menganalisis data yang ada menjadi suatu pembahasan yang menarik. Akan tetapi pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu dalam pencarian data sehingga mempermudah dalam mendapatkan data yang kemudian di kaji secara rinci ke dalam pembahasan guna mendapatkan kajian yang menarik. Adapun metode yang dapat di gunakan dalam analisis data ialah metode induktif yang merupakan suatu pengambilan kesimpulan melalui data khusus yang di lanaskan fakta konkret untuk menarik generalisasi yang bersifat umum. Adapun teknik lain yang dapat di gunakan dalam analisis data pada penelitian ini ialah teknik triangulasi yang memiliki sistem analisa data berupa :

##### **a) Reduksi Data**

Reduksi data merupakan penyaringan data-data kasar yang di temukan oleh peneliti baik di lapangan ataupun melalui penelitian sbelumnya agar memudahkan penulis dalam melakukan ringkasan dan pelaksanaan analisis sehingga penulis mendapatkan data akurat

yang pantas untuk di tampilkan dalam penelitian ini. Bentuk analisis ini mampu menajamkan, menggolongkan, memilah sedemikian rupa untuk mendapatkan penarikan hasil yang akurat dan dapat diverifikasi. Data kualitatif yang di hasilkan dari reduksi ini akan lebih mudah untuk disederhanakan dan transformasikan melalui berbagai macam cara, yaitu : seleksi, penggolongan, ringkasan agar mendapatkan hasil yang singkat dengan satu pola yang luas.

#### **b) Penyajian Data**

Setelah peneliti mengumpulkan data dan menyeleksi data yang di dapatkan, maka penulis melakukan penyajian data sesuai dengan kebutuhan penelitian agar tidak menampilkan kelebihan data yang mampu menimbulkan kerumitan analisa atau bahkan kekurangan data yang menyebabkan kurang relevan dan akuratnya penelitian tersebut sebab minimnya fakta di lapangan.

#### **c) Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan penarikan benang merah yang penulis dapatkan dari perolehan data. Pada tahap ini penulis dapat membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang dapat menunjang permasalahan dalam penelitian ini mengingat terdapat beberapa rumusan

masalah yang harus di selesaikan melalui pencarian jalan keluar dari hal-hal yang di jadikan perhatian dalam penelitian ini.